TOPIK UTAMA

Media dan Wacana: Telaah Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Barat

Dedi Kurnia Syah Putra

Pengajar Tetap Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom, Bandung
Email: dedikurniasp@telkomuniversity.ac.id

ABSTRAK

Relasi kepentingan antara Harian Umum Pikiran Rakyat (HUPR) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), khususnya dalam hal keterbukaan informasi publik, menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Melalui telaah wacana yang dirumuskan oleh Teun A. Van Dijk, penelitian ini berupaya untuk mengungkap bagaimana HUPR berperan dalam produksi wacana pemberitaan. Kemudian, persoalan wacana ini dilihat dari asumsi Gramsci terkait hegemoni. Beberapa hal temuan mengarah pada pola kepentingan yang saling melingkupi, baik HUPR maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kepentingan itu berupa citra dan reputasi terkait keterbukaan informasi di sisi kuasa pemerintah, dan sisi ekonomi dari sirkulasi pemasok iklan di HUPR oleh Pemerintah dari sisi HUPR. Tentu kepentingan tersebut, terjalin karena adanya tarik menarik kekuasaan dalam memproduksi informasi yang kemudian di konsumsi oleh publik secara permassif. Lebih jauh lagi, kondisi tersebut menghasilkan temuan bahwa kooptasi terbesar berhasil dilakukan oleh Pemerintahan, sedangkan HUPR tidak memiliki kekuatan berarti dalam menyusun wacananya sendiri, karena telah terdikte secara sistematis oleh Pemerintah, baik dari sisi ekonomi, politik dan sosial. Penelitian ini menegaskan, bahwa HUPR tidak menjalankan fungsinya sebagai *sharing information as knowledge*, melainkan hanya sebagai medium atau alat kekuasaan pemerintah dalam menciptakan legitimasi reputasi sebagai pemerintahan yang terbuka. Gramsci melalui teori Hegemoni (1991) meyakini bahwa pemerintah akan menggunaan semua sumber daya untuk pertahankan kekuasaannya. Dan kekuasaan itu diterjemahkan oleh Van Dijk melalui konstruksi wacana media. Dengan asumsi ini, maka apa yang sedang terjadi antara HUPR dan pemerintah merupakan saling tarik kepentingan terkait kekuasaan di koridornya masing-masing. Media dengan kepentingan kapital, dan pemerintah dengan kepentingan reputasi dan citra.

Kata kunci: Hegemoni Wacana, Relasi Media dan Politik, Keterbukaan Informasi Jawa Barat.

PENDAHULUAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap lebih jauh praktik kuasa media massa dalam membangun wacana, dengan pendekatan hegemoni Gramsci mencoba untuk mengurai praktik kuasa yang bekerja di balik wacana informasi publik di Provinsi Jawa Barat. Tujuannya, mengkaji wacana media dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kepentingan yang mengitarinya dalam konteks praktik keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Barat. Juga, sebagai upaya mengungkap bagaimana cara-cara yang digunakan antar kelas kepentingan tersebut

menanamkan kepentingannya kepada media massa.

Persoalan krusial dalam penelitian ini, adalah adanya pertarungan kepentingan antara Harian Umum Pikiran Rakyat (HUPR) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), khususnya dalam hal keterbukaan informasi publik. Di sini, peneliti tertarik untuk lebih lanjut mengemukaan persoalan tersebut, pertarungan kepentingan yang melandasi bangun realitas berbeda di antara kedua isntitusi publik di aas. HUPR, dalam khazanah kajian media dan komunikasi merupakan institusi publik yang tidak kalah penting sebagaimana adanya pemerintahan. Untuk itu, sudah seharusnya kedua institusi ini berjalan seimbang dan beriring, pemerintah berfungsi sebagai penggerak roda pemerintahan, sedang media menjadi mesin pengetahuan bagi masyarakat.

Hanya saja yang terjadi kemudian, tidaklah demikian. Media massa memiliki alur yang berbeda dengan pemerintahan, meskipun membawa nama kepentingan bersama, media massa cenderung berkuasa membangun wacana yang tidak melibatkan kepentingan publik arti luas. Juga, pemerintah memiliki agenda yang seringkali tidak terkait langsusng dengan kepentingan publik, justru kepentingan yang kental kekuasaan sepihak. Di sinilah persoalan penelitian ini menarik, adanya tarik ulur, pertarungan ideologi yang melibatkan publik sebagai objeknya.

Membaca realitas sementara tersebut, peneliti mencoba menggunakan sudut pandang Antonio Gramsci dalam menguraik persoalan ini ke depan. Gramsci, merupakan tokoh eksponen Marxian dengan teori dan pandangan hegemoni dan revolusi sosial. Gramsci mematahkan tesis utama Marxisme bahwa dominasi kekuasaan tidak selamanya berakar pada kepentingan ekonomi saja, akan tetapi juga berakar juga pada kebudayaan dan politis (*pragmatis sosial*). Dalam struktur kekuasaan, bagi Gramsci setidaknya melibatkan dua hal untuk membangun kuasa. *Pertama*, relasi kuasa melalui alur kesadaran, kondisi ini dapat dipenetrasikan dengan jalan pemaksaan dan kekerasan; *Kedua*, penguatan kekuasaan melalui alur hegemoni, yaitu dengan cara kepatuhan dan kesadaran pada tiap-tiap elemen masyarakat.

Fokus analisis Gramsci adalah bagaimana mematahkan rantai hegemoni ini, sehingga ia memunculkan *counter hegemony*. Dalam kondisi ini secara terang-terangan Gramsci berbeda dengan pandangan Marxisme lain yang meyakini bahwa determinisme ekonomi merupakan satu-satunya alat kuasa yang membuat masyarakat terbelenggu oleh

penguasa, akan tetapi Gramsci lebih menitik beratkan hegemoni dan kepemimpinan budayalah yang membuat masyarakat menjadi terbelenggu oleh penguasa. Jadi harus ada gerakan massa penolak hegemoni tersebut, keadaan tersebut ia sebut sebagai gerakan revolusi sosial, massa harus mengembangkan ideologi revolusioner namun mereka tak bisa melakukan semua itu dengan sendirian.

Sehingga harus ada gagasan dari kaum intelektual dan selanjutnya di perluas ke massa dan di praktikkan oleh mereka. Pada tahap selanjutnya massa perlu bantuan elit-elit sosial begitu massa di pengaruhi oleh gagasan ini maka mereka akan aksi yang mengarah pada revolusi sosial. Jadi untuk mengendalikan ekonomi dan aparatur Negara cukuplah digunakan revolusi dan juga perlu meraih kepemimpinan budaya terhadap seluruh masyarakat.

Bagi Antonio Gramsci terkait determinisme modern, bukan hanya ekonomi yang membelenggu masyarakat akan tetapi banyak faktor lain seperti politik dan kebudayaan. Lebih lanjut bagi Gramsci, kebudayaan dan politik sangat memepengaruhi kehidupan masyarakat. Dengan politik yang melanggengkan kekuasaan yang otoriter dan budaya yang di ciptakan oleh sistem sosial pemerintah yang seolah-olah pemerintahan yang bersih tanpa kesalahan apapun membuat masyarakat larut akan keindahan semu, dengan di tekannya orang yang radikal dan kritis juga kebudayaan yang melanggengkan rezim maka revolusi sosial itu harus segera di galakkan oleh masyarakat sebelum rezim akan lebih sewenang-wenang dan otoriter terhadap masyarakat.

Pemikiran Gramsci yang demikian itu, dalam penelitian ini akan digunakan untuk membedah hegemoni kuasa media massa di Jawa Barat, yakni Harian Umum Pikiran Rakyat terkait dengan keterbukaan informasi publik, yang melibat Komisi Informasi Publik sebagai representasi pemerintah. Dalam pengantar singkat ini, peneliti akan mengurai sedikit terkait perlu penelitian ini dilanjutkan. Salah satunya memahami kondisi keterbukaan informasi di Jawa Barat.

Bergulirnya reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (*Good Governance*). Demi terwujudnya tata kelola yang baik tersebut, negara melalui pilar legislatif menyusun satu ketentuan hukum yang merangkum kebutuhan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Terlebih lagi dengan revolusi teknologi komunikasi yang mencuat awal tahun 1990, modernisasi teknologi informasi

dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat.

Dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat dalam memberikan infomasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Terlebih dengan adanya Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang **Keterbukaan Informasi Publik (KIP),** pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat seluas-luasnya dan semudah-mudahnya akses. Hanya saja, kebebasan akses atas informasi yang kian kini takberbatas mempunyai resiko yang juga tidak sedikit. Beberapa di antaranya adalah kuatnya kontrol warga negara atas kinerja pemerintah, sehingga sangat mungkin akan mengganggu stabilitas kinerja itu sendiri karena ruang kontrol yang terlalu mendominasi.

Menurut UU KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penye-lenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU KIP ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan adanya amanat UU KIP maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi Dan Kabupaten/ Kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang.

Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyedian, dan/atau pelayanan informasi. Agar keterbukaan informasi publik berjalan sebagaimana mestinya, maka dibentuklah Komisi Informasi. Komisi Informasi ini juga merupakan pelaksanaan lanjutan terkait UU KIP. Komisi ini bertugas untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi nonlitigasi disamping berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya *clean and good governance* karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk

menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel. Mengenai mekanisme untuk mendapatkan informasi dapat dibaca pada artikal Mekanisme Keterbukaan Informasi Publik. Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Pelayanan publik atau sering disebut pelayanan masyarakat, pelayanan umum atau juga *public service* merupakan salah satu kegiatan dari pemerintah yang selalu menjadi perhatian publik. Opini publik terhadap aktivitas pemerintahan dalam bidang pelayanan masyarakat yang beredar dan berkembang masih memiliki kecenderungan yang lemah ketimbang keunggulan yang dapat diwujudkan secara konkrit. Kelemahan ini tercermin dari banyaknya keluhan terhadap terjadinya penyimpangan baik biaya, prosedur, atau ketidakpastian waktu untuk suatu jasa yang diinginkan. Banyaknya keluhan yang disampaikan melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik adalah bukti tidak efektifnya pelayanan publik yang diberikan oleh para aparatur pemerintah, yang sesungguhnya dapat diakomodir menjadi nilai plus.

Rendahnya kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia terjadi di semua organisasi atau birokrasi pemerintahan sebagaimana juga sering dimuat dan diliput dalam berbagai media massa. Kecenderungan tersebut terjadi baik di tingkat pusat maupun di daerah, termasuk pada birokrasi di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

KAJIAN TEORI DAN KONSEPTUAL

Hegemoni Komunikasi Publik

Keberhasilan suatu pemerintahan dalam mewujudkan tercapainya tujuan institusional secara efisien tergantung berbagai macam faktor. Keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para anggota institusi jelas membawa pengaruh dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Di samping hal tersebut salah satu faktor yang diperlukan untuk mencapai tujuan ialah komunikasi yang dikembangkan dan diatur secara baik oleh institusi.

Setiap kegiatan institusional yang melibatkan keharusan pelaksanaan tugas dari para anggotanya memerlukan informasi yang cukup

memadai sesuai dengan tahap kegiatannya. Tidak satupun dari institusi kegiatan yang tidak memerlukan informasi, baik dalam artian pemberian pengertian ataupun dalam arti penyampaian informasi dan pemahaman.

Ditinjau dari sudut ilmu komunikasi yang mempelajari dan meneliti proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku seseorang maka dalam konteks penyelenggaraan pelayanan informasi publik, proses komunikasi terjadi secara primer dan sekunder, sebagaimana dikemukakan oleh Effendy (1992: 18) bahwa:

> Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau lambang (simbol) sebagai media komunikasi yang salah satunya adalah bahasa. Bahasa paling banyak digunakan dalam komunikasi karena hanya bahasalah yang mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain, yang disampaikan melalui pesan-pesan.

Proses komunikasi juga melibatkan dua komponen yang kedua-duanya adalah manusia. Menarik disimak sehubungan dengan keterlibatan manusia dalam proses komunikasi penyataan Thoha (1991: 107) yang mengemukakan bahwa: *"jika ada manusia berkomunikasi dengan makhluk halus menurut lazimnya tidak lumrah. Artinya tidak semuanya manusia biasa melakukannya"*. Karena itu dalam pembahasan penelitian ini tidak mempunyai kecenderungan membicarakan komunikasi yang tidak lumrah, justru sebaliknya komunikasi yang rasional dan dapat dilaksanakan dalam birokrasi pemerintahan.

Pertama, adalah birokrat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dan diharapkan berperan secara komunikatif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, khususnya pelayanan informasi publik. *Kedua*, adalah komunikan yaitu publik atau masyarakat sebagai orang yang mendapatkan layanan. Kedua unsur aktor komunikasi dalam penelitian ini tentunya diarahkan untuk dapat mencapai kesepahaman dalam memaknai isi pesan atau informasi yang disampaikan, baik oleh birokrat kepada publik, demikian pula sebaliknya tatkala pesan diinformasikan oleh publik, maka birokrat pun diharapkan dapat memaknai dan menterjemahkan isi pesan, baik dalam bentuk masukan seperti dukungan dan tuntutan ataupun dalam bentuk keluaran, penerimaan dan kepercayaan masyarakat kepada birokrat.

Diskursus Komunikasi Birokrasi

Pada bagian ini, berisi kajian-kajian teori dan konseptual yang akan membantu peneliti untuk menguraikan persoalan yang terjadi dalam objek penelitian, yakni relasi kuasa atas keterbukaan informasi antara media dan

pemerintah. Membincang diskursus komunikasi, maka setidaknya ada dua tokoh utama; yakni Michel Foucalt dan Jurgen Habermas. Bagian ini akan mengurai terlebih dahulu pemikiran Habermas. Jurgen Habermas merupakan salah satu filsuf yang melakukan perlawanan terhadap oposan biner ide-materi ini dengan paradigma komunikasi nya. Pandangan ini menempatkan konstruksi nalar pengetahuan manusia diperoleh dari perbincangan-perbincangan rasional dalam ruang yang bebas dan emansipatoris (ruang publik).

Sebagai salah satu tokoh Mazhab Frankfurt, Habermas mempunyai pijakan kuat pada tradisi-tradisi marxis terutama pada kritik sosialnya meskipun memiliki perbedaan besar dalam postulat-postulat epistimologisnya. Dia berusaha menyelamatkan ajaran marx dari memori serta bias sejarah dan dogma ideologi ke dalam konteks waktu serta realita kekinian. Hal ini dilakukan dengan melawan skeptisme marx terhadap materi dengan mengembalikan agensi rasio manusia.

Namun berbeda dengan pemikiran idealis klasik, agensi rasio ini harus diikutsertakan dalam sebuah praktek komunikasi yang mengganti paradigma kerja menjadi paradigma komunikasi. Hal lain yang penting dari revisinya terhadap Marx dan pemikir-pemikir Mazhab Frankfurt lain adalah keharusan dorongan praksis dalam setiap teori. Salah satu buah pemikirannya yang cukup penting adalah konsep dan teori tentang diskursus. Secara sederhana diskursus merupakan sebuah percakapan atau wacana. Untuk membedakannya dengan perbincangan sehari-hari, diskursus tidak sekedar dialog sederhana seperti ketika kita bertanya kabar teman, bertanya harga, atau dialog sehari-hari lainnya. Dalam diskursus terdapat tematisasi dan pemetaan masalah sehingga diskursus dapat dianggap sebagai sebuah komunikasi reflektif yang mentematisasi sebuah permasalahan tertentu.

Dalam masyarakat Indonesia sebenarnya praktek ini telah melekat dan menjadi kearifan sosial. Hal-hal seperti musyawarah, dialog, dan semacamnya telah menjadi budaya dalam masyarakat kita. Namun hal ini seolah menjadi paradoks dan sesuatu yang ironis ketika dihardapkan dengan era demokrasi pasca reformasi. Era keterbukaan yang seharusnya menjadi pintu gerbang demokrasi malah perlahan membawa Indonesia menuju negara gagal. Hal ini terindikasi dengan karut marutnya praktek demokrasi baik dari tingkat grassroot maupun elit. Dalam penelitian ini, dengan menggunakan konsep diskursus Habermas, penulis akan memaparkan prospek

aplikatif diskursus yang telah melekat dalam kearifan sosial masyarakat Indonesia untuk dapat memperbaiki praktik keterbukaan informasi, sebagai bentuk kualitas kehidupan demokrasi di era reformasi ini.

Ketika komunikasi berlangsung, praktek yang terjadi tidak hanya sebuah percakapan atau dialog biasa, latar belakang komunikasi (Lebenswelt [Jerman] atau lifeworld [Inggris]) komunikator menjadi hal penting yang sangat berpengaruh dalam proses ini. Hal ini berpengaruh secara pra reflektif dan bahkan pra sadar sehingga membawa proses komunikasi ke arah yang tendensius. Tendensi ini tidak selalu buruk, dan bahkan memaknai komunikasi yang berjalan.

Hal lain yang sangat berperan adalah klaim-klaim kesahihan atau kebenaran. Klaim kesahihan dalam tematisasi komunikasi yang terus berlangsung akan membawa kita menuju sebuah kesadaran akan keberadaan labenswelt dan akhirnya membuat komunikasi menjadi lebih cerdas. Prinsip ini jika berjalan dengan baik tentunya merupakan modal yang sangat berharga dalam sebuah praktek demokrasi. Dalam demokrasi yang sehat, opini publik sebagai sebuah input *blackbox* sistem harus benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat sehingga agregasi politik oleh partai politik juga tentunya akan berjalan dengan lebih baik. Namun fragmentasi praktek komunikasi antara elit dan rakyat membuat demokrasi pun terfragmen antara kedua kelompok ini.

Keterbukaan Informasi Publik Jawa Barat

Konsep utama terjadinya pembangunan berkelanjutan bagi pemerintahan, adalah dengan penguatan Tata Kelola (*Good Governance*) dan Keterbukaan Informasi Publik (*Public Access Information*). Berangkat dari asumsi itu, seluruh stakeholder pemerintahan di berbagai tingkatan, pusat hingga pelosok desa. Seyogyanya menjadikan dua arus utama tersebut sebagai misi yang stabil.

Sebagai pengantar, setidaknya telah berlaku sekira Lima tahun undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sejak tahun 2010 undang-undang ini diberlakukan. Artinya, setelah kurun waktu itu badan publik seyogyanya sudah menerapkan berbagai kewajiban yang diamanahkan oleh undang-undang keteraksesan informasi oleh publik, beberapa misalnya menyusun standar pelayanan informasi publik dan mengumumkan serta menyediakan informasi publik yang dinyatakan terbuka .

Di sisi lain, publik sebagai masyarakat terdampak dapat memanfaatkan kepastian perlindungan hak mereka untuk meminta

berbagai informasi publik. Persoalannya, keterbukaan informasi (*Hilir*) merupakan refleksi dari semua bentuk kepastian kinerja pejabat publik (*Hulu*), sehingga yang menjadi perhatian penuh adalah persoalan informasi itu diproduksi.

Keterkaitan dengan itu, –merujuk pada pembangunan di lingkungan Provinsi Jawa Barat— menjadi penting dan utama adanya tata kelola pemerintahan yang baik, ini ditandai dengan standar operasional yang mewakili komitmen keterbukaan informasi publik. Selebihnya, adanya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) beserta sistem pengawasan kinerja dan hasil kerja (*quality and control*).

Sejauh ini, kehadiran Undang-undang keterbukaan informasi ini memberikan kepastian kepada semua pihak, baik badan publik sebagai termohon maupun warga negara atau lembaga sebagai pemohon, dalam hal kepastian jenis informasi yang terbuka dan dapat dikecualikan, kepastian prosedur untuk mengakses informasi, serta kepastian penyelesaian sengketa jika mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi publik.

Sebagai lokomotif transparansi, keterbukaan informasi merupakan penopang tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Selanjutnya transparansi ini pada akhirnya berkaitan dengan pilar lain, mendorong peningkatan partisipasi warga dalam proses penyusunan kebijakan publik dan pembangunan yang mempengaruhi kehidupan warga negara. Secara umum di Indonesia, sejak tahun 1970-an telah berkembang pemikiran dan upaya mendorong partisipasi warga negara dalam pembangunan.

Partisipasi warga negara ini terutama sekali berkaitan dengan pengawasan kinerja, sehingga hasil kerja dari kebijakan-kebijakan publik sesuai dengan misi pembangunan, dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Barat. Keterlibatan warga negara juga dapat melengkapi partisipasi aktif untuk mendukung berlangsungnya pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), sebagai upaya penghindaran terjadinya korupsi secara sistematis dan administratif. Kesimpulannya, transparansi berkembang untuk lebih jauh mendorong partisipasi sosial berupa keterlibatan warga negara dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan suatu pembangunan.[1]

Di sinilah keterbukaan informasi publik dapat memberikan kontribusi signifikan untuk

[1] John Gaventa dan Camilo Valderama: "Partisipasi, Kewargaan, dan Pemerintah Daerah", pengantar buku *Mewujudkan Partisipasi: Teknik Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21*, The British Council dan New Economics Foundation, 2001

meningkatkan kualitas partisipasi warga. Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ini dengan jelas bertujuan antara lain, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.[2]

Hegemoni Kuasa Media Massa

Pers Sebagai Pemangku Realitas Keterbukaan informasi pasca reformasi 1998 melahirkan beberapa efek yang dialami oleh media, khususnya media cetak. Salah satunya adalah semakin intensnya media meliput dan memberitakan momentum politik. Dalam dunia politik modern, partisipasi masyarakat dalam momentum politik ditentukan oleh kesadaran politik serta pencitraan terhadap proses politik yang berlangsung. Pencitraan yang dimainkan oleh pemerintah melalui perankat-perangkatnya, menjadi sangat penting karena alat propaganda mampu memposisikan dirinya sebagai mesin produksi wacana atau diskursus.[3]

Peran media menjadi bagian strategis, sehingga dengan kuasanya masyarakat tidak memiliki pilihan dalam menolak. Konsep kuasa media secara tegas *taken for granted* bagi masyarakat. Hegemoni dalam model pendekatan ini dipandang sebagai medan kelompok dominan dalam mempersuasi dan mengkomunikasikan kepada publik pesan ideologis yang di sampaikan.[4] Semasa rezim orde baru media cenderung monolitik dalam memberitakan situasi politik nasional, dengan alasan stabilitas politik aparat negara yang menangani persebaran informasi dan komunikasi membatasi media baik cetak, elektronik dalam menyajikan informasi kepada masyarakat.

[2] Pasal 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[3] Istilah diskursus untuk menerjemahkan kata perancis *discourse* (Inggris: discourse), yang memegang peranan sangat penting dalam filsafat Perancis. Dengan memilih "diskursus", kita kembali kebentuk asli kata itu dalam bahasa latin. Sebagai kata sifat akan digunakan"diskursif" ada alasan kuat memilih istilah-istilah ini, karena dalam bahasa Indonesia sudah dikenal kata-kata " kursus" dan "kursif" biarpun artinya berbeda, bentuknya berasal dari akar latin yang sama "diskursus" dan diskursif". Diskursus menurut Sara Mils adalah menstrukturkan pemaknaan kita atas dunia dan konsep kita atas identitas kita. Baca selengkapnya: Eriyanto. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Jogjakarta: LkiS, 2005), h.13

[4] Ideologi adalah suatu proses yang dicetuskan secara sadar oleh mereka yang disebut pemikir dengan kesadaran palsu yang mampu menggerakkan sebuah tindakan yang nyata, ideologi sering diposisikan sebagai referensi utama dalam melakukan sebuah tindakan secara sadar dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dalam pandangan marx dan engels bahwa ideologi adalah bentuk kesadaran yang mengungkapkan komitmen mendasar dari suatu kelas sosial. Lihat: Henry D. Aiken, *Abad Ideologi* (Jogjakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2002), h. 6

Secara sederhana, konsep hegemoni Antonio Gramsci adalah ketika kelas-kelas subordinat dipimpin oleh blok historis. Faksi kelas yang berkuasa menjalankan otoritas sosial melalu kombinasi antara kekuatan dan juga konsensus (Barker, 2004). Dengan pandangan itu, sudah sejalannya media massa berotasi tanpa ada halangan di tengah-tengah gelombang pilihan atau penolakan masyarakat. Konsep hegemoni sendiri ditemukan awalnya ketika Gramsci mencari sebuah pola dalam kelas sosial baru yang saat itu Gramsci lebih banyak melihat fenomena pada sejarah gereja Roma (*the Roman Church*).

Gramsci terlihat kagum atas bangunan kekuatan ideologi Kristen gereja Roma yang berhasil menekan perselisihan ideologi yang berkembang berlebihan, antara agamawan terpelajar (*religion of the learned)* dan rakyat sederhana (*simple folk) (Kolakowski, 1978).* Gramsci, mengatakan bahwa hubungan tersebut memang terjadi secara "mekanikal" atau struktural, namun dia menyadari bahwa gereja Roma telah sangat berhasil dalam perjuangan memperebutkan dan menguasai hati nurani para pengikutnya (Kolakowski, 1978).

Dalam pemikirannya, jika saja kelas pekerja bisa membentuk suatu budaya baru dan sistem kekuatan yang baru seperti yang dilakukan gereja Roma, kelas pekerja akan membentuk pola baru terhadap pekerja intelektual dan interrelasi baru antara politik dan produksi ekonomi disatu sisi dan, disisi lain aktivitas dari kaum proletar diambil alih oleh kaum intelektual yang terbentuk (Kolakowski, 1978). Sudut pandang ini sejalan dengan konteks media massa modern, bahwa media sebagai kelas penguasa (*rulling class*), mampu membangun realitas yang pragmatis yang mengemuka terus menerus. Seiring dengan itu, satu-satunya alur yang mampu meredam hegemoni media massa adalah meningkatnya kelas subordinat menjadi kelas pereda kuasa (*counter hegemony*), yakni kebebasan informasi publik.

Namun ketika masyarakat merayakan kebebasan publik dalam mengakses informasi dan terbebas dari penunggalan tafsir realitas. Dengan adanya kebebasan pers sebagaimana yang dijamin oleh negara pada pasal 2 UU. No.40 tentang Pers bahwa "Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum" maka ragam sajian informasi yang ditampilkan lebih variatif, ditambah dengan asumsi bahwa konsumen industri media telah memasuki *symbolic hypermarket* dimana konsumen memiliki kebebasan memilih dan menafsirkan

semua teks yang ditampilkan media lokal maupun luar.[5]

Situasi pertukaran komunikasi yang sudah tidak melihat batasan bangsa, negara, etnik, suku, agama yang akan menggiring pembaca pada sebuah konsepsi yang beragam pula. Demikian halnya yang terjadi dalam dunia politik. Menurut Bernard Hennessy (1981) bahwa politik bukan hanya semata-mata proses pembuatan kebijakan didalam lembaga politik formal namun juga berarti bentuk pertukaran opini yang menjangkau publik secara luas. Pers dimanapun adalah organ yang vital dalam proses pembentukan opini publik. Bahkan di sejumlah negara memakai sistem pers yang totalitarian, informasi yang disajikan oleh pers harus dipahami publik sebagai kebenaran satu-satunya.[6]

Dalam masyarakat yang menganut sistem pers bebas sekalipun, fungsi pers dalam pembentukan opini publik tetap penting. Fakta terakhir inilah yang dalam tradisi politik amerika serikat melahirkan teori mengenai *"Pers sebagai the fourth estate of democracy"*. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, Fungsi pembentukan opini pun mengalami perkembang yang pesat pula sehingga skala jangkauan media dalam pembentukan opini publik mengalami perluasan yang signifikan, dengan demikian peran media dalam mengorganisir gagasan yang disajikan diterjemahkan sebagai keharusan politik pers.

METODE PENELITIAN

Wacana Kritis van Dijk

Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Teun A van Dijk dari paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif. Konsep *Critical Discourse Analysis* (CDA) adalah "lebih mementingkan aspek kualitatif dari daripada kuantitatif". CDA menekankan perhatiannya pada pemaknaan teks ketimbang panjumlahan unit kategori seperti dalam analisis isi.

Dasar dari *Critical Discourse Analysis* (CDA) adalah interpretatif yang mengandalkan

[5] *Simbolic hypermarket* adalah istilah yang diperkenalkan oleh Chris Barker seorang tokoh postmodern dari *Birmingham Culture Studies Center* yang menilai masyarakat telah memasuki era kebebasan menafsirkan teks, teks ketika telah menyapa pembaca maka makna teks menjadi tidak tunggal. Teks menjadi milik siapa saja dengan kata lain kelahiran sebuah teks menandai awal kematian penulis sekaligus kelahiran makna baru yang lebih variatif. Baca selengkapnya: Chris Barker. *Cultural Studies. Teori dan Praktik* (Jakarta: Tiara Wacana, 2005), h. 125

[6] Menurut Stuart Hall, ada dua proses representasi. Pertama, representasi mental. Yaitu konsep tentang 'sesuatu' yang ada di kepala kita masing-masing (peta konseptual). Representasi mental ini masih berbentuk sesuatu yang abstrak. Kedua, 'bahasa', yang berperan penting dalam proses konstruksi makna. Konsep abstrak yang ada dalam kepala kita harus diterjemahkan dalam 'bahasa' yang lazim, supaya kita dapat menghubungkan konsep dan ide-ide kita tentang sesuatu dengan tanda dan simbol tertentu

interpretasi dan penafsiran peneliti. Sementara analisis isi kuantitatif, pada umumnya hanya dapat digunakan untuk membedah muatan teks komunikasi yang bersifat manifest (nyata), sedangkan CDA justru berpretensi memfokuskan pada pesan laten (tersembunyi).

Sementara itu penelitian kualitatif juga tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka atau metode statistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubah menjadi entitas-entitas kuantitatif.

Analisis Wacana Kritis dari van Dijk mengidentifikasi tiga konstruksi utama, yaitu; dimensi teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Inti analisis wacana adalah menggabungkan ketiga demensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan. van Dijk (1997: 144) mengemukakan bahwa "CDA digunakan untuk menganalisis wacana-wacana kritis, diantaranya politik, ras, gender, kelas sosial, hegemoni, dan lain-lain".

Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian untuk dianalisis dan diberikan interprestasi dengan cara mengklasifikasikannya dengan kerangka teori, lalu kemudian di simpulkan. Dengan demikian, setelah diperoleh wacana yang akan dianalisis, maka sebagai rujukan adalah dengan menggunakan analisis wacana kritis seperti yang dikemukakan Teun Van Dijk. Oleh van Dijk wacana kemudian digambarkan memiliki tiga elemen, yaitu : dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial.

Pertama, dalam dimensi teks, terdiri dari ; a) struktur makro, yaitu makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik atau tema yang diangkat suatu teks, elemennya adalah tematik; b) Super Struktur, yaitu kerangka suatu teks, seperti bagian pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan. Elemennya adalah skematik; c) Struktur Mikro, yaitu makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat, dan gaya yang dipakai suatu teks. *Kedua,* yaitu kognisi sosial yaitu bagaimana wartwan atau penulis mengetahui dan memahami peristiwa yang ditulisnya. *Ketiga,* konteks sosial, yaitu mengetahui apa yang sedang terjadi di masyarakat, dan dampak di masyarakat setelah adanya pemeberitaan tersebut.

Inti analisis wacana adalah menggabungkan ketiga demensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan. Teknik ana-lisis wacana model van Dijk di pilih karena menganalisis ketiganya (dimensi teks, kognisi

sosial dan konteks sosial). Teknik ini dirasa cocok dibandingkan dengan analisis wacana (*discourse analysis*) lainnya yang lebih mengarah pada ideologi.

PEMBAHASAN

Diskursus Relasi Media Dan Politik

Matrik Berita Isu Kepentingan Publik di Harian Umum Pikiran Rakyat

No	Judul	**Isu**	**Edisi**
1	Hindari Penyimpangan, BPK Perketat Pengawasan Dana Desa	Pemerintah melakukan pengawasan atas alokasi dana yang sudah disalurkan ke desa-desa penerima dana hibah di kabupaten Sukabumi. Langkah tersebut setelah digelontorkan bantuan kepada 381 desa se-Kabupaten Sukabumi. Bantuan untuk alokasi dana desa maupun dana desa dengan kisaran Rp 700 juta hingga Rp 1 miliar setiap desa dikhawatirkan bermasalah dalam pengelolaan sehingga tidak bisa dipertanggung-jawabkannnya.	**Minggu, 30 Oktober 2016**
2	Inspektorat Diminta Awasi Pungli	Bupati Sumedang Eka Setiawan mengintruksikan kepada kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang untuk memantau sekaligus mengawasi kemungkinan terjadinya praktik pungutan liar (pungli) di dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya di lingkungan Pemkab Sumedang. Salah satu isntitusi yang disorot adalah dinas pendidikan, di mana pendidikan merupakan institusi yang paling dekat dengan publik, karena melibatkan masyarakat secara langsung.	**Rabu, 2 November 2016**
3	Wali Kota Siapkan Perwal UMK 2017	Pemerintah Kota Bekasi menjanjikan akan memfasilitasi aspirasi kaum buruh terkait penetapan Upah Minimum Kota Bekasi tahun 2017. Pada dasarnya Pemkot Bekasi berkeinginan menyejahterakan buruh. Akan tetapi, tentunya upaya tersebut tetap harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di atasnya. Peraturan tersebut mengatur penetapan UMK yang mengacu pada kondisi ekonomi di suatu daerah. Laju inflasi menjadi pertimbangan utamanya. Menurut PP Nomor Tahun 78, rumus penetapan UMK ialah UMK tahun berjalan ditambah dengan hasil kali laju inflasi dengan besar UMK tahun berjalan. Dengan demikian, penetapan UMK tidak lagi melalui rapat Dewan Pengupahan Kota yang didahului dengan survei harga di pasar demi penentuan angka Kebutuhan Hidup Layak.	**Selasa, 25 Oktober 2016**

4	Pejabat Disnakertrans Tertangkap Tangan Terkait Rekrutmen	Pemerintah melalui Wakil Bupati Karawang Jimmy Ahmad Zamakhsyari, turut bersama Komisi D DPRD Kabupaten Karawang menangkap tangan adanya praktik rekrutmen tenaga kerja di kawasan industri Karawang. Dalam sidak tersebut, didapati Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Karawang sedang melakukan pertemuan. Melihat keadaan yang demikian, Wakil Bupati meminta dinas terkait untuk mengevaluasi kinerja aparaturnya demi tegaknya perundang-undangan yang melarang seorang pejabat publik melakukan lobi-lobi. Terutama jika menyangkut profesionalisme pekerjaan. Meskipun demikian, seorang aparat pemerintahan tersebut menolak jika dirinya disebut melakukan lobi-lobi terkait rekruitasi tenaga kerja.	**10 Oktober 2016**
5	Pemkab Karawang Dituduh Endapkan Rp 400 Miliar, Tiga Fraksi Walkout	Pemerintah Karawang terungkap melakukan pengendapan dana pembangunan dalam simpanan deposito sebesar Rp 400 miliar. Sehingga terjadi defisit anggaran yang seharusnya terpakai sebesar Rp 40 miliar. Akan tetapi, simpanan deposito itu tidak pernah digunakan. Pemkab Karawang justru memangkas sektor kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Simpanan Rp 400 miliar itu pun menjadi penyebab ditundanya penyaluran Dana Alokasi Khusus kepada Pemkab Karawang yang jumlahnya mencapai Rp 226 miliar pada tahun berjalan. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Karawang, Natala Sumedha di Gedung DPRD Karawang, seusai aksi walkout fraksi PDI Perjuangan dalam rapat Selasa 11 Oktober 2016. Mengatakan bahwa langkah efesiensi seperti itu berdampak langsung kepada masyarakat yang membutuhkan pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.	**11 Oktober, 2016**

Wacana Keterbukaan Informasi Publik

"Media ini (Pikiran Rakyat) dibangun dan dirawat dengan ketenangan, kekeluargaan, mengokohkan persaudaraan, boleh jadi kami harus memihak, tetapi kami memilih cara memihak dengan jalan tengah, tidak menyinggung dan tidak provokatif". – Islaminur Pempasa, Pimpinan Redaksi HUPR.

Secara terbuka, Harian Umum Pikiran Rakyat (HUPR) tidak menonjolkan wacana apapun dalam pemberitaannya. Hanya saja penelitian ini menemukan beberapa fakta menarik terkait dengan posisi tawar HUPR dalam membangun pesan keterbukaan informasi bagi Provinsi Jawa Barat. Membedah keterbukaan informasi yang diharapkan oleh HUPR. Keterbukaan informasi publik merupakan segala bentuk materi pesan yang terkait kepentingan publik yang dikelola oleh pemerintah provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini, HUPR berposisi sebagai kontributor sekaligus produsen informasi tersebut untuk publik. Secara umum, bagian ini mengungkap bagaimana HUPR memandang keterbukaan informasi di Jawa Barat selama ini, juga perihal bagaimana dan apa yang telah dilakukan HUPR, melalui pemberitaanya, juga melalui penguatan pengetahuan SDM (*Jurnalis*) dalam memproduksi berita agar pemberitaan tersebut bermanfaat bagi masyarakat.

Masalah keterbukaan informasi publik yang sangat penting adalah merumuskan mana informasi yang boleh dibuka ke publik dan mana yang tidak. Selain itu, Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu wujud konkret dari proses demokratisasi di indonesia. Di mana transparansi atas setiap informasi publik membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dalam mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat.

Akuntabilitas dapat membawa ke tata pemerintahan yang baik, yang bermuara pada jaminan terhadap hak asasi manusia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, bangunan wacana keterbukaan informasi publik yang digali dalam penelitian ini merupakan informasi yang seutuhnya menjadi kebutuhan masyarakat. Di atas, setidaknya beberapa kategori pemberitaan yang muncul dan mewakili keterbukaan informasi, berbasis kebutuhan masyarakat berkaitan dengan hukum, politik, birokrasi, dan lainnya.

Selama ini, persolan terkait keterbukaan informasi ini lebih banyak persoalan anggaran, sedang isu lain yang berkaitan secara langsug kepada masyarakat, semisal alur pembuatan KTP, penggunaan anggaran pembangunan, pengawasan atas infrastruktur dan lain-lain tidak begitu didengar. Kondisi ini terjadi karena dua hal, masyarakat yang memang tidak memerlukan informasi tersebut, dan pemerintah yang tidak menyediakan fasilitas

aksesnya. Sehingga keterbukaan informasi masih dalam tahap apa yang ditanyakan, belum sampai pada keaktifan pemerintah memberikan informasi secara terbuka.

Rana Akbari Fitriawan (42), Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Barat, mengatakan masih banyak SKPD yang belum memahami mana informasi yang boleh dibuka ke publik dan mana yang tidak. Terlebih soal anggaran, tidak mungkin disampaikan secara detail, cukup rumusan kebijakan anggaran dan program-programnya. Keterbukaan informasi adalah bagian dari harmoni, dengan tetap memiliki keterbatasan yang jelas. Sehingga, Informasi yang lancar akan mengurangi masalah, sebaliknya bila terhambat dapat menyebabkan masalah sampai pada kekerasan.

Hanya saja, kondisi tersebut tidak sejalan dengan kerja media massa di Jawa Barat, HUPR lebih menekankan pada aksesnya, bukan konten informasinya. Yang mana untuk mengakses konten sangat rumit dan terbatas, terutama di daerah luar Kota Bandung sebagai Ibukota Jawa Barat. Selama ini akses informasi melalui Dinas Kominfo Jabar. Hanya saja, kondisi tersebut hanya berupa alur birokrasi saja, sedangkan ketersediaan konten informasinya masih sangat minim. Sehingga, HUPR kesulitan memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat terkait kepentingannya.

> "Keterbukaan informasi bagi kami di komisioner adalah segala bentuk materi pesan birokrasi yang seharusnya dbuka di publik. Di buka itu artinya pemerintah menyediakan fasilitas aksesnya, bukan menunggu masyarakat mencari tahu baru pemerintah sibuk mencari materi informasi" –Rana Akbari Fitriawan, Komisioner Komisi Informasi Publik Jabar.

Lebih jauh, Rana mengungkapkan bahwa keterlibatan media massa di Jawa Barat, terutama HUPR selama ini tidak dominan dan menekan. HUPR hanya menjadi media pengirim kabar, tanpa adanya upaya untuk memposisikan diri sebagai penekan pemerintah sehingga pemerintah tergerak untuk inisiatif menyediakan layanan informasi kepada masyarakat. juga, Rana mengklaim kemungkinan adanya daya tawar HUPR kenapa tidak melakukan penekanan terhadap pemrintah. Sedang Komisioner sifatnya haya sebagai pengawas.

> "Tentu yang memiliki wewenang kan pemerintah, kami di KIP hanya sebatas pengawas saja, pemberi rekomendasi, sedang tapuk keputusan ada di gedung sate (*pemerintah*). Dan HUPR, seharusnya berpern aktif dalam hal-hal seperti ini (*keterbukaan informasi*)." –Rana Akbari Fitriawan, Komisioner Komisi Informasi Publik Jabar.

Sedang pimpinan redaksi HUPR, Islaminur Pempasa memberikan keterangan pendukung. Bahwa akses informasi sejatinya teah berada di satu pintu, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dinas inilah yang dianggap sebagai juru bicara pemerintah, pusat informasi publik berada. Dan pemrintah secara representatif telah di wakili oleh Diskominfo.

> *"Memang betul ada regulasi yang menyatakan segala akses informasi publik melalui Diskominfo Jabar. Hanya saja, mereka (Diskominfo) tidak menyediakan informasinya. Misal kita memerlukan penjelasan tentang penggunaan dana desa, atau alur pembuatan KTP, mereka akan melemparkan ke dinas-dinas terkait, sehingga informasi yang benar-benar diperlukan tidak tersedia dalam satu pintu itu".*—Islaminur Pempasa, Pimred HUPR.

Kognisi Sosial atas Wacana HUPR

Dalam memahami sebuah teks, kognisi sosial menjadi hal terpenting. Pada umumnya teks diasumsikan tidak mempunyai makna namun anggapan ini tidak sepenuhnya benar, karena teks tersebut sesungguhnya diberikan makna oleh si pemakai bahasa (*pewarta*). Makna inilah yang dikonstruksi oleh pewarta. Seperti yang dijelaskan Teun van Dijk, bahwa dalam memahami suatu teks perlu ada penelitian mengenai kognisi sosial; kesadaran mental penulis yang membentuk teks tersebut.

Untuk mendukung kognisi sosial, peneliti menggunakan metoda penggalian data dengan melakukan serangkaian interview terhadap Jurnalis HUPR. Selain itu, dalam penelitian ini juga dibutuhkan satu pendekatan atas representasi kognisi dan strategi wacana keterbukaan informasi yang dilakukan oleh HUPR dalam memproduksi suatu teks. Berita keterbukaan informasi yang dipublikasikan melalui HUPR di kolom berita. Mereka tidak terlepas dari konstruksi teks serta mental dari pengalaman jurnalis terjadap ideologi gaya penulisan di HUPR.

Tentunya dalam hal ini HUPR memiliki nilai, pengaruh dan ideologi dari kehidupannya yang mempengaruhi dalam terbentuknya teks berita tersebut. Artinya, semua jurnalis di lingkungan HUPR memiliki gaya tulis, penguasaan bahasa, dan selingkung yang sama karena memang dikondisikan demikian. Keterbukaan informasi yang diberitakan oleh HUPR merupakan hasil dari refleksi sehari-hari yang terjadi di wilayah administrasi Jawa Barat, bisa berupa persoalan Hukum, Rekruitmen Pegawai, Politik, Birokrasi, dan berbagai hal yang secara langsung dijalani oleh masyarakat.

Kognisi sosial didasarkan pada anggapan umum yang tertanam dan digunakan pewarta untuk memandang peristiwa sebagai apa, dan

bagaimana harus mengemasnya. Kemudian pewarta akan melakukan serangkaian penataan ide, ide ini secara alami menyesuaikan kebutuhan HUPR terkait isu tersebut. Pewarta harus mampu melakukan analisa untuk menjawab pertanyaan bagaimana peristiwa dipahami, dan dimengerti didasarkan pada skema. Skema jurnalis dihasilkan secara kolektif dari kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh melalui interaksi antar jurnalis sesama HUPR, juga dibangun melalui arahan-arahan yang terus menerus digiatkan di lingkungan HUPR.

Lebih lanjut, kognisi sosial di HUPR bukan muncul pada orang perorang, melainkan dibentuk dan dilatih terus menerus oleh HUPR. Teun van Dijk menyebut skema ini sebagai model. Skema dikonseptualisasikan sebagai struktur mental dimana tercakup didalamnya bagaimana penulis memandang manusia, peranan sosial dan peristiwa itu sendiri. Skema ini akhirnya menuntun penulis untuk memahami, memaknai dan mengingat sesuatu.

Oleh karena itu, menurut van Dijk, analisis wacana harus menyertakan bagaimana reproduksi kepercayaan yang menjadi landasan bagaimana penulis menciptakan suatu teks tertentu. Dalam praktiknya, ada beberapa skema/model yang telah dijelaskan van Dijk, yaitu skema person, skema diri, skema peran dan skema peristiwa (Augoustinos, 1995: 36). Dari seluru skema tersebut yang akan berkontribusi dominan dalam membangun wacana pertama. Karena memang, di semua media massa, termasuk dengan HUPR, jurnalis atau wartawan merupakan bagian paling depan karena dari merekalah informasi diproduksi.

Keempat skema di atas turut dianalisis dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana skema penulisan berita yang berpotensi membawa wacana keterbukaan informasi di Jawa Barat oleh HUPR. Juga atas kebutuhan data penelitian untuk menjelaskan pemahaman jurnalis dalam memahami peristiwa dan menyajikannya dalam berita keterbukaan informasi yang dipublikasikan melalui berita.

Media: Masyarakat dan Kelas Counter Hegemoni

Konsep hegemoni menjadi kajian populer setelah Antonio Gramsci membangun kesadaran pemikira politik modern. Ilmuwan politik Italia ini memberikan banyak argumentasi terkait adanya konsep kekuasaan. Anthonio Gramsci mengungkap tentang konsepsi negara dan hegemoni. Patria dan Arief (1999: 113-114) dalam paparannya menjelaskan konsep hegemoni dari Gramsci lahir untuk menjawab dua permasalahan utama. Yang mana persoalan itu terkait dengan

proses penciptaan sebuah revolusi di Italia, sekaligus merupakan tantangan atas penafsiran Marxis setelah kematian Marx, Engels, Lenin dan Stalin. Persoalan yang mengemuka dari pertarungan hegemoni itu sendiri –sebelum mengurai kontribusi HUPR dalam membangun wacana hegemonistisnya—, setidaknya ada dua persoalan utama.

Pertama, mengapa terjadi kesenjangan antara idealisme media di HUPR dengan praktek politik yang justru mendominasi produksi teks atas media tersebut, dalam hal ini tentu HUPR. Dengan kata lain, HUPR berhasil membangun kelompok kelas pembaca dan menaruh ide hegemoninya melalui pemberitaannya. Konsep ini menurut Gramsci adalah penebaran ide atas kekuasaan melalui wacana teks. Sehingga pembaca HUPR tanpa sadar dikuasai melalui bahasa, dan keseluruhan proses produksinya.

Hanya saja, HUPR tidak membangun kelas penentang kekuasaan, justru kelas masyarakat yang dibangun oleh wacana HUPR merupakan kelas tengah yang tidak memiliki kekuatan apa-apa dalam melakukan gerakan kontrol, semisal mengawa jalannya pemerintahan, keterbukaan informasi yang memadai, dan hal lainnya. Sebagaimana inspirasi dari Marx, pengelompokan kelas merupakan upaya untuk mengakhiri kekuasaan kelas elit dalam sistem kapitalisme yang cukup matang.

Kedua, sarana dan strategi apakah yang dapat dilakukan untuk menutup kesenjangan tersebut, masyarakat dianggap hanya sebagai penerima kuasa, yang harus tunduk dan lemah, sedang penguasa bertindak sebagai kelas pengatur yang memiliki kontrol penuh. Dalam konteks krisis inilah sebenarnya pemikiran Gramsci tentang hegemoni lahir. Kemudian, dalam hal ini peneliti mencoba menjelaskan kekuasaan dalam membangun wacana oleh HUPR dari sudut pandang nalar Gramsci.

Mengutip dari argumentasi Robert Bocock (1986) dalam Patria dan Arief (1999: 116), di mana kekuatan hegemoni media seringkali bertalian dengan kekuasaan elit atau pemerintah. Meskipun secara ideal, pemerintah dan media massa seharusnya saling bertolak belakang, mengingat media haruslah berposisi sebagai kontrol kekuasaan (konter hegemoni). Konsep hegemoni secara historis pertama kali diproduksi di Rusia pada tahun 1880 oleh seorang Marxis Rusia, Plekanov. Konsep ini dibangunnya sebagai bagian dari strategi untuk menjatuhkan pemerintahan Tsar. Hegemoni dalam definisi ini mengacu pada pengertian kepemimpinan *hegemonic-ploretariat* serta perwakilan-perwakilan politik mereka serta aliansi-aliansi dengan kelompok lain seperti

kaum borjuis kritis, petani dan intelektual yang berkeinginan sama untuk menjatuhkan pemerintahan Tsar.

Konsep hegemoni Gramsci (2001: 57-58) sebenarnya dapat dirunut melalui penjelasannya tentang Basis dari Supremasi Kelas, di mana supremasi kelompok di masyarakat menunjukkan eksistensinya melalui dua cara, yakni lewat dominasi (*dominance*) dan kepemimpinan intelektual (*direction*).

Melihat perkembangan pemberitaan HUPR, wilayah dominan ini dikemas melalui ideologi jalan tengah, yang mana HUPR memilih untuk menciptakan keheningan, ketenangan, meskipun harus mengorbankan kebenaran yang berpihak pada khalayak ramai. Artinya, HUPR tidak memposisikan diri sebagai media yang harus melakukan kontrol, melainkan menetapkan diri sebagai penyambung informasi semata, tidak lebih dari itu. Kemudian, pada tataran *direction*, adalah kekuasaan narasumber yang lebih sering memihak pada kekuasaan pemerintah dan HUPR hanya menerima informasi kuasa itu apa adanya, tanpa melakukan superfisi dengan menghadirkan narasumber penyeimbang.

Jika analoginya adalah kekuasaan konvensional, maka marxis memberikan penjelasan sebagai berikut. Kedua kelompok ini akan terus-menerus saling menundukkan. Biasanya kelompok sosial yang satu mendominasi kelompok-kelompok oposisi lewat berbagai cara, termasuk kekuatan senjata untuk melumpuhkannya. Di satu sisi, kelompok-kelompok sosial yang dipimpin oleh para intelek akan berusaha melawan dominasi rezim lewat mobilisasi kelompok kerabat, mahasiswa dan stake holder basis masyarakat lainnya. Gramsci mengisyaratkan satu hegemoni bisa hancur dan digantikan oleh kelompok sosial lainnya yang memiliki posisi yang dominan, sehingga menghasilkan rezim baru (*rulling elite*).

Penjelasan Gramsci tentang supremasi kelas, menunjukkan suatu totalitas yang didukung oleh kesatuan dua konsep yakni *direction* dan *dominance*. Hubungan kedua konsep ini menyiratkan tiga hal yakni: *Pertama*, dominasi dijalankan atas seluruh musuh dan kepemimpinan dilakukan kepada segenap sekutu. *Kedua*, kepemimpinan adalah suatu pra-kondisi untuk menundukkan aparatus negara (*kekuasaan pemerintahan*). *Ketiga*, sekali kekuasaan negara bisa direnggut, dua aspek supremasi kelas ini baik pengarahan ataupun dominasi akan terus berlanjut.

Analisis Gramsci di atas berusaha memberikan penjelasan bahwa sebenarnya semua kelas sosial di masyarakat memiliki

kecenderungan untuk menghegemoni, ketika memiliki kemampuan untuk mendominasi. Dominasi adalah kunci awal dalam proses hegemoni. Di antara sekian potensi dominasi, negara adalah institusi yang paling kuat dalam hal dominasi, sehingga wajar apabila negara memiliki kecenderungan tinggi untuk menghegemoni masyarakatnya.

Dalam konteks pengakuan dirinya sebagai seorang revolusioner yang tugasnya menciptakan revolusi sebagai suatu alternatif strategi bagi ”kemegahan” perjuangan sosialis, khususnya Italia dan Eropa umumnya, maka Gramsci sebagaimana dikutip oleh Hendarto (1993: 82-84) mengemukakan tiga tingkatan hegemoni yaitu: *Pertama*, hegemoni integral, yakni hegemoni yang ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. *Kedua*, hegemoni yang merosot (*decadent hegemony*), yakni kemerosotan yang disebabkan oleh lemahnya ”mentalitas” massa yang tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dari subjek hegemoni. *Ketiga*, hegemoni minimum (minimal hegemony), merupakan bentuk hegemoni yang paling rendah, dibanding dua bentuk di atas.

REFLEKSI WACANA

Wacana kritis ini mengungkap bahwa HUPR menjalankan praktik diskursus modernitas, yakni wacana secara sistem yang diarahkan oleh HUPR sebagai kelompok kapitalis kepada totalitarianisme birokratis (*pemerintah*) demi kepentingan akumulasi modal. Birokrasi dengan berbagai kerangka kerja institusionalnya menjadi alat korporasi dan modal untuk memperkokoh sistem akumulasi dalam satu tatanan pemerintahan. Birokrasi pasti menutup rapat akses publik terhadap berbagai praktek yang seharusnya terjadi di dalamnya.

Informasi merupakan alat yang akan mengantarkan pada diskursus publik dan melakukan penilaian terhadap berbagai unsur yang ada dalam informasi. Peniadaan informasi berarti peniadaan terhadap diskursus dan wacana publik terhadap berjalannya satu kesepakatan sistem. Konteks itulah kekuasaan dan penguatan akumulasi modal di dalamnya. Sistem yang tertutup merupakan ajang konspirasi dan penyalahgunaan kekuasaan satu rezim.

DAFTAR PUSTAKA

Ahba, Reawan. 1995. *Media and Thinking Humanity.* Singapore: Singapore University Press

Albrow, Martin. 1998. *Birokrasi*. M. Rusli Karim dan Totok Daryanto (pen). Yogyakarta: Tiara Wacana.

Alfian dan Syamsuddin, Nazaruddin (ed). 1991. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Allen, V.L. 1995. *Power in Trade Union.* London: Longman

Antony. 2004. *Riuhnya Persimpangan Itu: Seri Komunikasi.* Solo: Tiga Serangkai

Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arnhart, Larry. 1987. *Poitical Questions: Political Philosophy Plato to Rawls.* New York: Macmillan Publishing Company.

Badara, M. S. 2015. Empirical Evidence of Performance Measurement of Internal Analysis Function onits Effectiveness. *Academic Journal of Management Science Research, 1 (1), 1-10.*

Bagdikian, Ben. 2003. *The Media Monopoly.* New York: Longman

Baran, Stanley J. 2004. *Introduction to Mass Communication; Media literacy and Culture.* New York: McGraw Hill

Barker, Chris. 2005. *Cultural Studies. Teori dan Praktik.* Jakarta: Tiara Wacana

Baudrillard, Jean. 1998. *The Consumer Society*. London: Sage Publication

Baudrillard, Jean. 1978. *The Simulacra*. New York: McComb Publishing

Bigogiari, D. 1953. *The Political Ideas of St. Thomas Aquinas.* New York: Hafner

Blau, Peter M., dan Meyer Marshall. 2000. *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*. Penterjemah: Slamet Rijanto. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

Bungin, M. Burhan. 2007. *Sosiologi Komunikasi.* Jakarta: Prenada Media

Castells, Manuel. 2001. *The Power of Identity*. Oxford: Blackwell

Castells, Manuel. 2001. *The Rise of The Network Society.* Oxford: Blackwell

Compton, Boyd R. 1992. *Kemelut Demokrasi Liberal.* Jakarta: LP3ES

Crowley, David. and David Michell. 1994. *Communication Theory Today*. Kota: Polity Press

Dahlgren, Peter. 2000. *Teory, Boundaries and Political Communication.* London: Sage Publishing